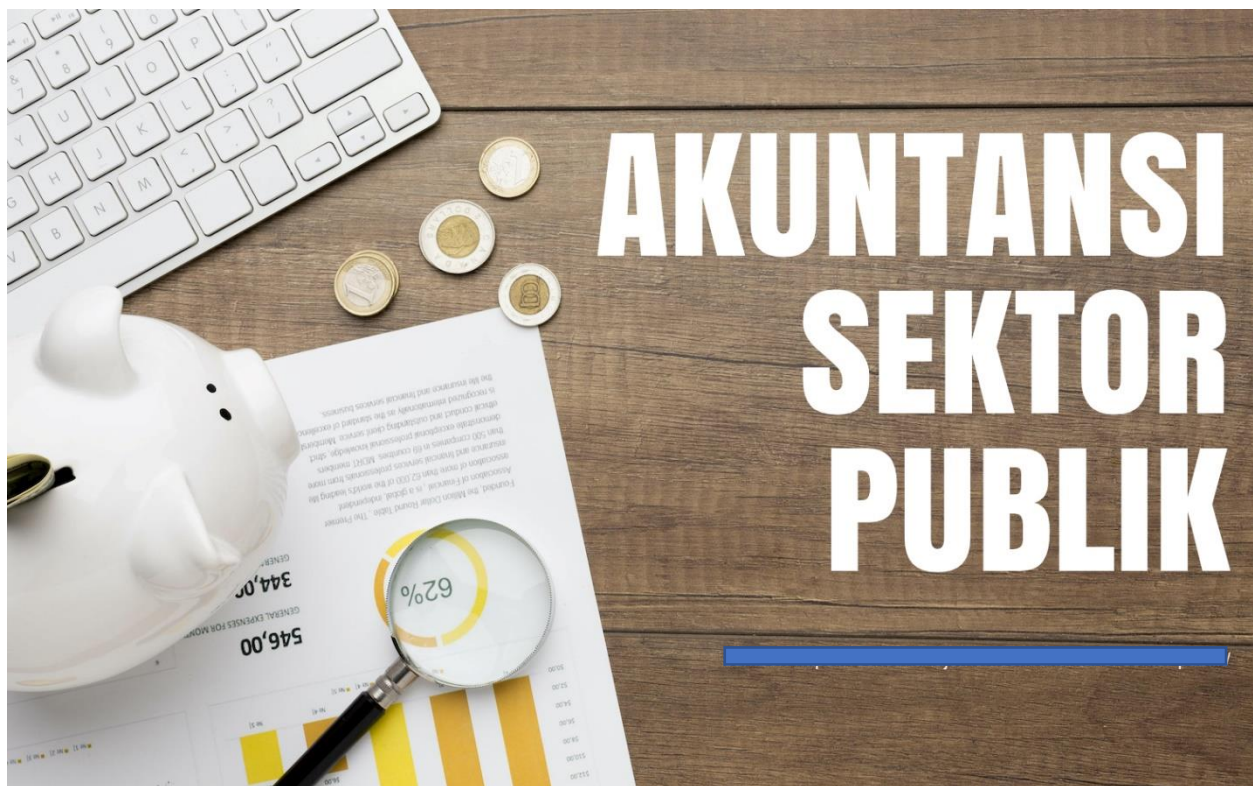


# MODUL

# MATA-KULIAH



**Dr. Tutty Nuryati, SE., M.Ak**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**



# **AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD**

## **I Ruang Lingkup Pendapatan Daerah**

Berdasar UU RI No.23 tahun 2014 tentang pendapatan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembahasan tentang akuntansi pendapatan daerah ini adalah akuntansi pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ada tiga sumber utama pendapatan daerah yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua transfer ke daerah, dan yang ketiga itu pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Beberapa daerah juga mendapatkan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Pemda juga berhak menerima lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana hibah dan bantuan keuangan dari entitas pemerintah yang lain. PAD, transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yaitu hak daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Struktur dari pendapatan asli daerah atau PAD itu dibagi menjadi empat komponen utama yang pertama yaitu pajak daerah. Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang tahun 2009 nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut baik oleh provinsi ataupun kabupaten dan kota. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bisa bersumber dari pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset tetap, aset lainnya pengembalian kelebihan Belanja, pemberian fasilitas sosial, fasilitas umum, tagihan ganti rugi, denda pajak dan retribusi dan juga hasil eksekusi atas jaminan. Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari transfer dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah transfer bisa bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan juga bisa juga berasal dari pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Kabupaten ataupun kota nanti akan mendapatkan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan juga dana transfer yang berasal dari pemerintah provinsi sebagai ganti dana bagi hasil atas pajak daerah yang dipungut oleh provinsi yang bersangkutan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah di situ terdiri dari hibah dan juga sumbangan pihak ketiga. Bagaimanakah kemudian kita bisa mengakui pendapatan daerah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya?

Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya kriteria untuk melakukan pengakuan pendapatan daerah itu ada dua. Pertama kita bisa menggunakan basis kas dan yang kedua kita bisa menggunakan basis akrual. Sudah kita pahami bersama bahwa basis kas itu akan diakui ketika kas itu diterima, sementara basis akrual itu akan kita akui ketika timbulnya hak atas pendapatan tadi. Sudah disebutkan bahwa ada berbagai macam jenis pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain yang sah, transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kriteria untuk melakukan pengakuan terhadap pendapatan daerah, untuk pendapatan basis kas kita nanti akan mencatatnya dalam satu pendapatan yaitu pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sementara contoh basis akrual nanti kita akan melakukan pencatatan dalam bentuk pendapatan Laporan Operasional (LO). Untuk pendapatan LRA, dasar pengakuannya ada tiga. Pertama ketika kas itu nanti diterima oleh rekening kas Umum Daerah sebagian menyebutnya dengan rekening kas daerah atau bisa juga diterima oleh bendahara yang ada di SKPD atau juga diterima

oleh entitas lain yang ada di luar Pemda, tetapi semua itu sudah mengatasnamakan sebagai bendahara Umum Daerah. Contohnya kalau kita perhatikan di pemerintah pusat itu ada yang disebut dengan penerimaan yang dilakukan oleh bank persepsi kemudian bank resepsi ini nanti akan menyetorkan ke rekening kas Umum Negara di Bank Indonesia. Jadi segala penerimaan yang diterima oleh bank persepsi oleh bank-bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah itu sudah dianggap sebagai pendapatan LRA, meskipun penerimaan itu belum disetorkan ke rekening kas umum negara yang ada di Bank Indonesia.

Untuk pendapatan LO, diakui ketika pendapatan tersebut telah terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai atau cash atau masih berupa piutang yang besar kemungkinan dimasa yang akan datang cukup pasti terealisasi atau istilahnya *realizable*. Ilustrasi yang akan membedakan antara pendapatan LRA dan pendapatan LO contohnya ketika pemerintah daerah menerima pendapatan diterima dimuka jadi ketika Pemda menerima pendapatan diterima dimuka. Ketika Pemda menerima pendapatan diterima dimuka berarti sudah ada aliran kas yang masuk ke SKPD. Aliran kas ini akan dicatat melalui pendapatan LRA karena pendapatan LRA diakui ketika kas itu diterima.

Di pendapatan LO Apakah pendapatan ini nanti kita sudah mengakui sebagai pendapatan? Ada 2 kriteria yang harus kita penuhi tadi. Kalau dua kriteria ini kita penuhi, berarti nanti akan dicatat di itu sebagai pendapatan yaitu timbulnya hak atas pendapatan. Jadi kalau misalnya contoh pendapatan diterima dimuka, katakanlah pemerintah daerah menyewakan gedung dan bangunan selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu nanti biaya sewanya misalnya 5 M, maka di pendapatan LRA nanti akan dicatat sebagai pendapatan sebanyak 5 miliar sementara kalau di pendapatan LO akan disesuaikan dengan timbulnya hak atas pendapatan. Jika tahun itu (tahun pertama) dicatat  $\frac{1}{5} \times 5$  m, karena jangka waktunya 5 tahun, jadi pendapatan LO nanti baru akan mencatatnya sebanyak 1 miliar. Sementara di pendapatan LRA sudah kita catat sebanyak 5 miliar. Jadi ada dua kriteria pengakuan pendapatan baik itu pendapatan LRA ataupun pendapatan LO, dimana keduanya menggunakan basis yang berbeda.

Pendapatan LRA tadi menggunakan basis kas sementara untuk mendapatkan LO kita menggunakan basis akrual.

## **II Ruang Lingkup Pendapatan SKPD**

Pendapatan SKPD meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima oleh SKPD (baik melalui bendahara penerimaan SKPD, bendahara penerimaan pembantu, maupun yang langsung diterima di kas umum daerah). Pendapatan SKPD merupakan hak daerah, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan pada SKPD penerima harus dibukukan sebagai pendapatan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pendapatan daerah ada tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dicatat di SKPD terutama pendapatan-pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, sedangkan jenis pendapatan transfer dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah itu akan menjadi bagian dari pendapatan yang dicatat oleh PPKD. Dalam PAD ada 4 sumber utama, tetapi yang dicatat di SKPD hanya 3 yaitu: pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah (sebagian).

Instansi pemungut untuk pajak daerah, bisa dipungut oleh 2 instansi, yaitu PPKD selaku BUD dan SKPD. Jadi nanti Kalau pajak daerah ini dipungut oleh PPKD selaku BUD berarti nanti akan dilaporkan transaksi ini di dalam akuntansi PPKD, sementara contoh pemungut pajak daerah itu SKPD lain di luar BUD berarti nanti akan dicatat oleh SKPD

Laporan keuangan SKPD ini ada 5 jenis laporan keuangan yaitu:

1. laporan realisasi anggaran
2. laporan operasional
3. neraca
4. laporan perubahan ekuitas dan juga
5. laporan perubahan SAL

Pendapatan dilaporkan di dua tempat tentunya yang pertama laporan realisasi anggaran dan yang kedua laporan operasional. Untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi pendapatan daerah yang ada di dalam SKPD tentunya akan kita lakukan pendapatan dengan buku besar kas dan buku besar akrual. Untuk buku besar akan dicatat dalam sistem akuntansi pelaksanaan anggaran (SAPA) sedangkan untuk buku besar akrual nya akan dicatat dalam Subsistem Akuntansi Keuangan atau SAK. Jadi dalam hal ini nanti sub sistem akuntansi pelaksanaan anggaran akan melakukan pencatatan terhadap pendapatan LRA kemudian pencatatan itu dilakukan dengan menggunakan basis kas, sementara untuk sub sistem akuntansi keuangan akan melakukan pencatatan atas pendapatan LO dengan menggunakan basis akrual.

Di Akuntansi Pemda, kita akan menggunakan akun penyeimbang di dalam jurnal anggaran kita akan menggunakan yaitu Estimasi Perubahan SAL sedangkan untuk di jurnal finansial di sub sistem akuntansi keuangan kita akan menggunakan akun resiprokal yaitu RK-SKPD atau Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kita akan mengulas bagaimana melakukan pencatatan akuntansi pendapatan khususnya yang ada dalam SKPD. Ilustrasi yang pertama kali di awal tahun anggaran itu biasanya SKPD akan menerima dokumen anggaran dokumen anggaran ini disebut dengan DPR yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Ketika dokumen pelaksanaan anggaran ini diterima oleh SKPD maka di SKPD akan mencatatnya baik di buku besar akrual ataupun di buku besar kas berdasarkan dokumen sumber yaitu daftar pelaksanaan anggaran di SKPD nanti

SAPA-LRA akan mencatatnya sebagai

Estimasi pendapatan	xxx	
Estimasi perubahan SAL	xxx	
Apropriasi Belanja		xxx

Jurnal finansialnya-LO tidak kita lakukan pencatatan

No Entry

Ilustrasi yang kedua yaitu ketika dilakukan saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan retribusi (SKR) ini sebetulnya ada dua pendekatan yang bisa digunakan pada saat terbit SKP atau SKR.

Pendekatan 1: Mencatatnya sebagai pendapatan

Pendekatan 2: Tidak mencatatnya sebagai pendapatan

Pendekatan yang kedua ini nanti dilakukan pencatatannya kapan? Tentunya nanti di akhir periode ketika dilihat berapa total atau SKR yang diterbitkan kemudian dibandingkan dengan berapa yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak atau retribusi jenis listrik ya itu akan dicatat sebagai piutang pada pendapatan pendekatan pertama dan pendekatan kedua ini Tentunya nanti menghasilkan hasil yang sama coba memang bedanya ketika pendapatan awal saja jadi ketika terbit SKP atau SKR ada yang mencatatnya sebagai pendapatan ada yang tidak mencatatnya sebagai pendapatan kalau di Permendagri 64 tahun 2013 ini sepertinya menggunakan pendekatan yang kedua jadi dia tidak melakukan pencatatan ini sebagai pendapatan akan tetapi dicatat sebagai pendapatan nanti di akhir periode.

Ilustrasi yang disampaikan disini adalah menggunakan pendekatan yang pertama yaitu ketika SKP atau SKR terbit, kita melakukan pencatatan itu sebagai pendapatan yaitu pendapatan ketika terbit Surat Ketetapan Pajak ganti di jurnal anggarannya Tidak ditanyakan kenapa tidak kita dapat tentu Kalian juga sudah memahaminya karena di jurnal anggaran ini

### **Pendapatan-Laporan Operasional (LO)**

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan diakui pada saat:

1. Timbul hak atas pendapatan (*earned*)
2. Pendapatan direalisasi



## **Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadikah pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pihak-Pihak yang Terkait:

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

1. Mencatat transaksi kejadian pendapatan LO dan LRA ke buku jurnal
2. PPK-SKPD posting jurnal-jurnal transaksi ke buku besar
3. Menyusun laporan keuangan LRA, LO, Neraca, dan CaLK

Bendahara Penerimaan SKPD:

1. Membukukan penerimaan ke buku kas penerimaan
2. Membuat rekap penerimaan harian
3. Menyetorkan pendapatan ke Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
2. Menandatangani laporan keuangan yang sudah disusun PPK-SKPD

### **Prosedur Pencatatan Pajak:**

Pengakuan pendapatan pajak Ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*Office Assesment*).

Contoh: Tanggal 1 Maret 2021 Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB 2021 sebesar Rp.2.000.000.

Jurnal LO atau Neraca:

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
1/3/21	SPPT		Piutang PBB Pendapatan PBB-LO	2.000.000	2.000.000

Pencatatan saat diterima pembayaran terlebih dahulu (*Office Assesment*)

Contoh: Tanggal 10 Juni 2021, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB

Jurnal LO atau Neraca:

Tanggal	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
10/6/21	SPPT		Kas di Bendahara Penerimaan Piutang PBB	2.000.000	2.000.000

Jurnal LRA:

	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
10/6/21	SPPT		Estimasi Perubahan SAL Pendapatan PBB-LRA	2.000.000	2.000.000

Pencatatan- Jika wajib pajak langsung menyetor ke Kas Daerah

Contoh: Tanggal 11 Juni 2021, wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Daerah.

Jurnal LO atau Neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
11/6/21	SPPT		RK-PPKD Piutang PBB	2.000.000	2.000.000

### Jurnal LRA

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
10/6/21	SPPT		Estimasi Perubahan SAL Pendapatan PBB-LRA	2.000.000	2.000.000

### Pencatatan–Penerimaan Pajak dari WP- *Self Assessment*

Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*)

Contoh: Tanggal 5 Mei 2021 Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April 2021 dari Hotel Asri sebesar Rp.7.500.000. Bdsr hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA

Jurnal LO atau Neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
5/5/21	TBP		Kas di Bendaraha Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel-LO	7.500.000	7.500.000

### Jurnal LRA

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
1/3/21	TBP		Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak Hotel-LRA	7.500.000	7.500.000

Pencatatan-Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah:

Contoh: Tanggal 6 Mei 2021 Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan Pajak Hotel yang diterimanya ke Kas Daerah.

Jurnal LO atau Neraca:

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
6/5/21	SSP		RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	7.500.000	7.500.000

Pencatatan- Pajak Kurang Bayar

Contoh: Tanggal 10 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Asri dan ditemukan adanya pajak kurang bayar Rp.1.700.000.

Jurnal LO atau Neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
10/5/21	SKPDKB		Piutang Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel-LO	1.700.000	1.700.000

**Pencatatan-Penyetoran pendapatan ke Kas Daerah**

Contoh: Tanggal 1 September 2021 Bendahara Penerimaan menyetorkan Pajak Reklame yang diterimanya ke Kas Daerah.

Jurnal LO atau neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
1/9/21	STS		RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	36.000.000	36.000.000

Pencatatan-Penyesuaian pendapatan Diterima Dimuka

Contoh: Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2021 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp.12.000.000 (1/9/21 s/d 31/12/21) = 4 bulan)

Jurnal LO atau Neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
31/12/21	BM		Pendapatan diterima dimuka Pendapatan Pajak Reklame	12.000.000	12.000.000

**Prosedur Pencatatan Retribusi**

Pengakuan pendapatan Ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*).

Contoh: Tanggal 1 Mei 2021 Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp.48.000.000.

Jurnal LO atau neraca

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debet	Kredit
1/5/21	SKPD		Piut. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah & Bangunan-LO	48.000.000	48.000.000

## **AKUNTANSI PENGELUARAN SKPD (AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA)**

Pokok bahasan akuntansi SKPD ini kita akan khusus mengupas masalah beban dan Belanja. Ketika kita membicarakan masalah akuntansi beban dan belanja, maka mau tidak mau kita akan menyinggung masalah akuntansi aset lancar maupun akuntansi aset tetap, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang belanja maka akan ada aspek pengeluaran uang kas maupun dalam hal ada pengembalian belanja. Jadi ketika kita belanja juga tentang adanya uang di bendahara pengeluaran, adanya uang di kas daerah yang akan dikeluarkan melalui akun RK-PPKD. Ketika kita juga nanti bicara tentang realisasi belanja, maka akan ada belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam bentuk perolehan barang milik daerah. Artinya disitu akan ada akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap.

### **Pengakuan Beban dan Belanja**

Pengakuan Belanja:

1. Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran

Pengakuan Beban:

1. Saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas Umum Daerah
2. Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah
3. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu

### **TRANSAKSI BELANJA (JURNAL ANGGARAN)**

Belanja dicatat pada sub-sistem akuntansi pelaksanaan anggaran (SAPA)

1. Belanja dibayar secara langsung oleh BUD (Belanja-LS) Rp.2.000.000. Jurnal pada Saat diterbitkan/diterima SP2D-LS:

Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2. Belanja dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dengan menggunakan UP/GU/TU. Pada saat SPJ Belanja UP/GU/TU disahkan oleh PA/KPA, jurnalnya:

Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

**TRANSAKSI BEBAN (JURNAL FINANSIAL)**

Beban dicatat pada sub-sistem akuntansi keuangan. Beban dapat berupa Belanja (selain belanja modal) maupun non belanja (seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dsb).

Beban berupa Belanja

1. Belanja LS

Jurnal Pada saat diterbitkan/diterima SP2D-LS:

Beban.....	xxx	
RK-PPKD		xxx

Jika digabung kedua sistem tersebut, maka jurnal Belanja melalui SP2D-LS adalah sebagai berikut:

SAK (BB Akrual)		SAPA (BB Kas)	
Beban	xxx	Belanja	xxx
RK-PPKD	xxx	Estimasi perubahan SAL	xxx

2. Belanja melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Jurnal pada saat Bendahara menerima UP/GU/TU, Berdasarkan SP2D-UP/GU/TU:

Kas di Bendahara Pengeluaran RK-PPKD	xxx	xxx
---	-----	-----

Jurnal pada saat SPJ belanja UP/GU/TU disahkan:

Beban..... Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
--	-----	-----

Jurnal pada saat penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kasda (pada saat akhir tahun):

RK-PPKD Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
---	-----	-----

**JURNAL TRANSAKSI BEBAN**

**Utang Beban**

Ayat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk mengakui belanja yang sudah menjadi utang Pemda, namun belum dibayar hingga akhir tahun:

Beban (selain Belanja modal) Utang Belanja	xxx	xxx
---	-----	-----

Jurnal jika beban tersebut terkait dengan pembelian aset tetap:

Aset Tetap (sesuai dengan jenis asetnya) Utang Belanja	xxx	xxx
---	-----	-----

**Beban Dibayar Dimuka**

**Contoh:**

Sewa dibayar dimuka untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Ayat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk mengakui belanja yang masih menjadi hak Pemda:



Beban Dibayar Dimuka	xxx	
Beban...		xxx

Beban berupa Konsumsi Aset

Pembelian Persediaan dengan UP

Beban Persediaan	xxx	
Kas di Bendahara pengeluaran		xxx

Jika persediaan dicatat dengan metode periodik, harus dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui nilai persediaan akhir tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat (jika pada saat pembelian persediaan dicatat ke akun “**beban**” disebut pendekatan beban):

Persediaan	xxx	
Beban Persediaan		xxx

Penerbitan SP2D-GU Nihil untuk pengesahan belanja akhir tahun

**Jurnal Finansial:**

Beban Barang dan Jasa	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

**Jurnal Anggaran:**

Belanja Barang	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

**Pengembalian Sisa UP ke Kas Daerah**

**Jurnal Finansial:**

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

### Jurnal Transaksi Pengembalian Belanja (untuk tahun berjalan)

Belanja Expendable (tidak menghasilkan BMD-Barang Milik Daerah).

#### Pengembalian Belanja Expendable (Finansial):

Kas di Bend. Pengeluaran/RK-PPKD	xxx	
Beban...		xxx

#### Pengembalian Belanja Expendable (Anggaran):

Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Belanja....		xxx

### Belanja Expendable TAYL-Tahun Anggaran Tahun Yang Lalu

#### Pengembalian Belanja Expendable (Finansial):

Kas di Bend. Pengeluaran/RK-PPKD	xxx	
Penadpatan Pengembalian Belanja TAYL		xxx

#### Pengembalian Belanja Expendable (Anggaran):

Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL		xxx

### Jurnal Transaksi Pengembalian Belanja

Belanja Non-expendable (Menghasilkan BMD-Barang Milik Daerah)

#### Pengembalaian Belanja NonExpendable:

Kas di Bend. Pengeluaran/RK-PPKD	xxx	
Persediaan/Aset Tetap		xxx

#### Pengembalaian Belanja NonExpendable:

Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Belanja Barang/Modal		xxx

## Jurnal Transaksi Pengembalian Belanja

### Belanja Non-expendable Tahun Anggaran yang Lalu

#### Pengembalaian Belanja NonExpendable (Finansial):

Kas di Bend. Pengeluaran/RK-PPKD	xxx	
Persediaan/Aset Tetap		xxx

#### Pengembalaian Belanja NonExpendable (Anggaran):

Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan pengembalian Belanja TAYL		xxx

### Ilustrasi

Pada tanggal 4 januari 2021 dinas A menerima SP2D senilai Rp.750.000.000. Jurnal yang ada:

TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
04/01	Kas di Bend. Pengel.	750		
	RK-PPKD	750		

Pada tanggal 27 Januari 2021, Entitas A menerima barang inventaris kantor berupa komputer beserta tagihannya senilai Rp.610.000.000. Tagihan tersebut baru diselesaikan 18 Februari 2021 dengan Uang Persediaan. Penerbitan SP2D-GU dilakukan tanggal 19 Februari 2021.

TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
27/01	Peralatan & Mesin	610		
	Utang Belanja Mdl	610		
TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
18/02	Utang Belanja Mdl	610		
	Kas di Bend. Pengel	610		
TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	

19/02	Kas di Bend Pengel RK-PPKD	610 610	Belanja Modal EPSAL	610 610
-------	-------------------------------	------------	------------------------	------------

Pada tanggal 4 Januari 2021, Dinas A menerbitkan SPM-LS untuk membayar gaji pegawai Rp.770.000.000. SP2D-LS terbit tanggal 5 Januari 2021.

TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
04/01	Beban Pegawai	770		
	Utang Belanja Pegawai	770		
TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
05/01	Utang Belanja Pegawai	770	Belanja Pegawai	770
	RK-PPKD	770	EPSAL	770

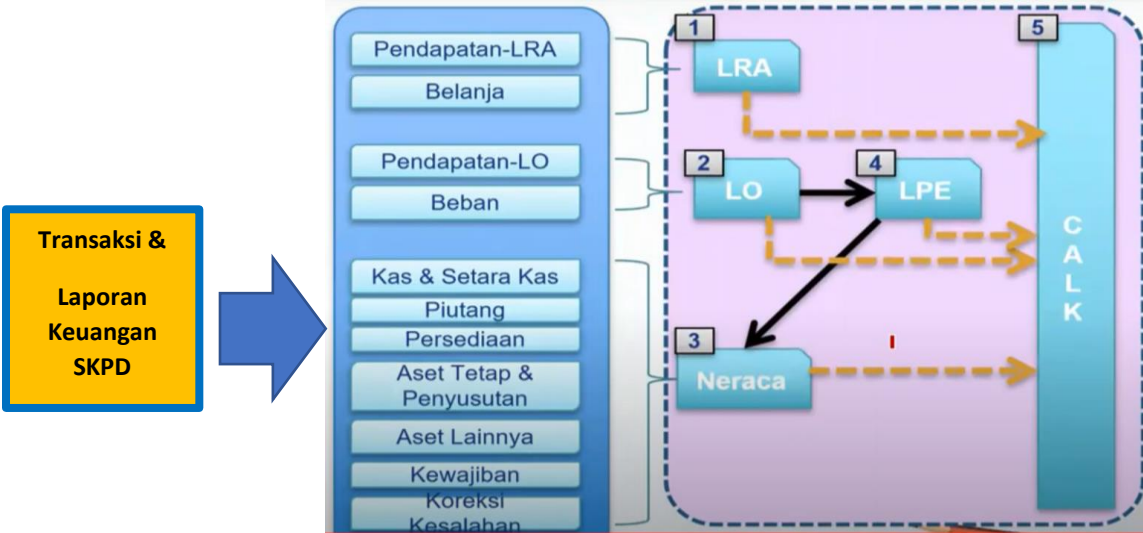
Pada tanggal 21 April 2021, Bendahara pengeluaran Dinas A menerima pengembalian kelebihan pembayaran honor tahun 2020 Rp.21.000.000. Sementara itu terdapat pengembalian atas kelebihan gaji tahun 2020 Rp.25.000.000 yang diterima di RKUD

TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
21/04	Kas di Bend. Pengeluaran	21	EPSAL	21
	Beban Barang	21	Belanja Barang	21
TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
21/04	RK-PPKD	25	EPSAL	25
	Pendptn. Pengem.BljTAYL	25	Pendptn. Pengem.BljTAYL	25

Pada tanggal 11 Juni 2021 Bendahara Pengeluaran Dinas A menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran Ketikaembali komputer sebesar Rp.7 juta yang dibeli pada bulan Maret 2021.

TGL	FINANSIAL		ANGGARAN	
11/06	Kas di Bend. Pengeluaran	7	EPSAL	7
	Peralatan dan Mesin	7	Belanja Modal	7

**ALUR TRANSAKSI DAN LAPORAN**



## **JURNAL PENYESUAIAN SKPD**

Penyesuaian merupakan sarana pemutakhiran data-data akuntansi berbasis akrual. Jurnal Penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional.

Hal-Hal yang menyebabkan dilakukan jurnal penyesuaian:

1. Koreksi kesalahan pencatatan

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Jurnal koreksi sebaiknya segera dilakukan begitu diketahui terjadi kesalahan pencatatan tanpa menunggu akhir tahun.

2. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas.

Pengakuan aset, hutang dan ekuitas merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh SKPD, diantaranya pengakuan piutang, persediaan dan utang. Sedangkan pengakuan aset tetap sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD.

3. Jurnal Depresiasi

Jurnal depresiasi merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh SKPD.

4. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Jurnal ini merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).

Bukti transaksi yang digunakan dalam jurnal penyesuaian berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia. Jurnal Penyesuaian dicatat pada Buku Jurnal Umum untuk selanjutnya diposting ke Buku Besar. Penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yang biasanya melibatkan akun aset kewajiban ekuitas pendapatan dan beban sehingga tidak akan ada dalam laporan realisasi anggaran. Akun-akun yang terlibat yaitu:

1. Asset
2. Kewajiban
3. Ekuitas

Tujuan dilakukan Jurnal Penyesuaian:

Melaporkan semua pendapatan (revenues) yang diperoleh (earned) selama periode akuntansi.

1. Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi.
2. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca.
3. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca

Ilustrasi;

1. Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan ini merupakan pendapatan pajak dan/atau bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara, tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari keada pihak ketiga.

Contoh pendapatan diterima dimuka:

SKPD A menyewakan gedung selama 3 bulan, yang dimulai Desember 2020 dengan total pendapatan sewa sebesar Rp. 3.000.000. Dalam transaksi ini tidak semua pendapatan tersebut merupakan pendapatan tahun 2020, namun hanya 1 bulan (Desember) sehingga masih ada pendapatan yang belum diberikan jasanya sebesar 2 bulan (Januari dan Februari 2021).

Jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah:

<b>Jurnal Penyesuaian:</b>		
Pendapaan Sewa	2.000.000	
Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka		2.000.000

## 2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan ini merupakan pendapatan PNBPN yang Berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk ditagih.

Contoh pendapatan diterima dimuka:

Rumah sakit non BLU melayani pasien, dimana sampai dengan akhir tahun 2020 terutang biaya pasien sebesar Rp. 4.000.000. Atas transaksi ini maka pada akhir tahun 2020, terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp. 4.000.000 (yang sudah menjadi milik rumah sakti tersebut).

Jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah:

<b>Jurnal Penyesuaian:</b>		
Pendapaan yang Masih harus Diterima	4.000.000	
Pendapatan Rumah Sakit		4.000.000

## 3. Belanja Dibayar Dimuka

Transaksi ini adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat terjadinya pembayaran tersebut.

Contoh belanja dibayar dimuka

SKPD A menyewa gedung kantor untuk masa sewa 3 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.30.000.000 dimulai awal Januari 2020. Atas transaksi sewa tersebut,



maka pada saat akhir tahun 2020 akan timbul belanja dibayar dimuka sebesar Rp.20.000.000.

Jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah:

<b>Jurnal Penyesuaian:</b>		
Belanja Dibayar Dimuka	2.000.000	
Beban Sewa		2.000.000

4. Belanja yang masih harus Dibayar.

Transaksi ini merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerinrah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keunagan belum dibayarkan.

Contoh Belanja yang masih harus dibayar:

SKPD A belum membayarkan kenaikan gaji pegawai sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp.12.000.000. Atas hal ini, maka pada akhir tahun 2020 akan timbul Belanja yang masih harus diabayar sebesar Rp.12.000.000 (beban ini merupakan beban SKPD A untuk tahun 2020)

Jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah:

<b>Jurnal Penyesuaian:</b>		
Beban Pegawai	12.000.000	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		2.000.000

Contoh Jjurnal penyesuaian yang lain

1. Diketahui nilai persediaan alat tulis kantor yang masih tersisa pada akhir tahun sebesar Rp.1.000.000. Untuk mengerjakan jurnal penyesuaian ini, kita lihat terlebih dahulu saldo awal di neraca, misalkan Rp.500.000. Hal ini berarti ada penambahan saldo sebesar  $Rp.1.000.000 - Rp. 500.000 = Rp. 500.000$ . Maka kita harus mendebet persediaan dan mengkredit beban (karena pada saat pembelian dalam periode tersebut, pencatatan dilakukan dengan mendebet beban).

**Jurnal Penyesuaian:**

Persediaan Alat Tulis Kantor	500.000	
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor		500.000

2. SKPD A memiliki Gedung kantor dengan harga perolehan Rp. 240.000.000 dan memiliki kendaraan dinas bermotor Rp.149.000.000. Berdasarkan asumsi penyusutan asset tetap mulai diterapkan terhitung tahun 2020 (tahun sebelumnya belum pernah dilakukan penyusutan). Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus (straight line method) dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Diasumsikan penyusutan dilakukan setahun penuh berdasarkan saldo akhir asset tetap akhir tahun. Masa manfaat asset tetap ditetapkan untuk bangunan gedung kantor 50 tahun sedangkan untuk kendaraan dinas bermotor perorangan 7 tahun. Berdasarkan perhitungan, diperoleh besarnya penyusutan tahun 2020 sbb:  
Nilai bangunan gedung kantor yang harus disusutkan Rp. 4.800.000, sedangkan untuk kendaraan dinas bermotor perorangan Rp.33.070.000.

**Jurnal Penyesuaian:**

Beban Peny. Alat Angkutan Darat Bermotor	33.070.000	
Beban Peny. Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.800.000	
Ak. Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		33.070.000
Ak. Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja		4.800.000

3. Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya listrik dan jasa untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 15.325.000 belum terbayarkan.

**Jurnal Penyesuaian:**

Beban Jasa Listrik	15.325.000	
Utang Belanja Jasa		15.325.000

# **LAPORAN KEUANGAN SKPD**

## **Jenis Laporan keuangan SKPD**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan SKPD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Laporan Reaalisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD secara tersanding dan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

## Catatan atas Laporan keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan keuangan (CALK) adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan secara wajar. Dalam langkah-langkah menyusun laporan keuangan, penyusunan CaLK tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat CaLK berisi penjelasan-penjelasan pada pos-pos laporan keuangan.

## Neraca Awal

<b>NERACA</b>			
<b>SKPD A</b>			
<b>1 JANUARI 20xx</b>			
Piutang Pajak Daerah	3.000.000	Kewajiban	-
Persediaan Hahan Pakai Habis	5.000.000	Ekuitas	362.500.000
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000		
Alat Angkutan Darat Bermotor	42.000.000		
Alat kantor	6.000.000		
Alat Rumah Tangga	4.000.000		
Komputer	5.000.000		
Meja dan Kursi Kerja	8.000.000		
Ak. Penyusutan Alat dan Mesin	(13.000.000)		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000		
Bangunan Geddung Tempat Tinggal	75.000.000		
Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22.500.000)		
<b>Total Aset</b>	<b>362.500.000</b>	<b>Total Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>362.500.000</b>

## Transaksi di SKPD A

1. Bendahara Penerimaan SKPD A menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan tahun lalu Rp.2.000.000 untuk PBB Pedesaan dan perkotaan dan pajak penerangan jalan Rp.1.000.000.

2. Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas Rp. 3.000.000 ke Kas Daerah atas penerimaan pajak sebelumnya.
3. Bendahara Penerimaan SKPD A menerima SP2D UP dari BUD sebesar Rp.3.000.000 sebagai Uang Persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari.
4. Diterima tagihan perusahaan utilitas atas pemakaian listrik, air dan telepon masing-masing sebesar Rp. 800.000, Rp. 200.000 dan Rp. 600.000.
5. Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan Uang Persediaan untuk pembayaran listrik, air dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Jumlah uang yang dibayar adalah Rp.400.000, Rp. 300.000 dan Rp. 600.000.
6. Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan Uang Persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, perangkai, materai, isi tabung gas dan bahan-bahan kebersihan totalnya sebesar Rp.1.250.000.
7. Bendahara Pengeluaran SKPD A mempertanggung-jawabkan Uang Persediaan yang digunakan sebesar Rp. 2.450.000. Pada saat yang sama, Bendahara Pengeluaran SKPD A menerima SP2D GU dari BUD sebagai pengganti uang Persediaan yang telah digunakan sebesar Rp.2.450.000.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan Uang Persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp. 2.300.000.
9. SKPD A menerima tagihan atas perawatan kendaraan dan pemeliharaan Gedung masing-masing sebesar Rp. 1.200.000 dan Rp.1.000.000.
10. Dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan Gedung yang telah diterima sebelumnya dengan menggunakan SP2D LS.
11. Dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa bagi pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2D LS sebesar Rp.25.000.000 yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh final PPh ps 21 atas gaji tersebut sebesar 5%.
12. Dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.15.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh ps 22 sebesar 0.5%.
13. Dilakukan pengeluaran untuk pembelian kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.40.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% sebesar 10% dan PPh ps 22 sebesar 0,5%.
14. Dibuat Surat Ketetapan Pajak Daerah Rp. 20.000.000 untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan, Rp. 10.000.000 untuk BPHTB, dan Rp.15.000.000 untuk Pajak penerangan jalan.
15. Diterima kas oleh Bendahara Penerimaan SKPD A dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel Rp. 8.500.000 dan pajak restoran Rp.7.500.000.

16. Bendahara penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.16.000000 ke Kas Daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya
17. Diterima kas sebesar Rp. 41.000.000 oleh Bendahara Penerimaan SKPD A dari Wajib Pajak atas pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan rincian Rp. 16.000.000 untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan, Rp.10.000.000 untuk BPHTB, dan Rp. 15.000.000 untuk pajak penerangan jalan.
18. Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp. 41.000.000 ke Kas Daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya
19. Diterima pembayaran dimuka untuk pajak reklame sebesar Rp.7.000.000.

### Jurnal Transaksi SKPD A

Jurnal Finansial					Jurnal Pelaksanaan Anggaran				
Tgl	Keterangan	P/R	D	K	Tgl	Keterangan	P/R	D	K
1	Kas di Bend. Penerimaan		3.000.000		1	Perubahan SAL		3.000.000	
	Piutang Pajak Daerah			3.000.000		Pendapatan PBB P&P-LRA			2.000.000
						Pendptn pjik penerangan jalan-LRA			1.000.000
2	RK PPKD		3.000.000		2	No entry			
	Kas di Bend. Penerimaan			3.000.000					
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000		3	No entry			
	RK-PPKD			3.000.000					
4	Beban jasa kantor		1.600.000		4	No entry			
	Utang belanja barang & jasa			1.600.000					
5	Utang belanja barang dan jasa		1.200.000		5	Belanja jasa kantor		1.200.000	
	Kas di Bend. Pengeluaran			1.200.000		Perubahan SAL			1.200.000
6	Beban bahan pakai habis		1.250.000		6	Beban bahan pakai habis		1.250.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			1.250.000		Perubahan SAL			1.250.000
7	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.450.000		7	No entry			
	RK PPKD			2.450.000					
8	Beban perjalanan dinas		2.300.000		8	Beban perjalanan dinas		2.300.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			2.300.000		Perubahan SAL			2.300.000
9	Beban perawatan kend.bermotor		1.200.000		9	No entry			
	Beban pemeliharaan		1.000.000						
	Uang belanja barang & jasa			2.200.000					
10	Utang belanja barang & jasa		2.200.000		10	Belanja perawatan kend.bermotor		1.200.000	

Jurnal Finansial					Jurnal Pelaksanaan Anggaran				
Tgl	Keterangan	P/R	D	K	Tgl	Keterangan	P/R	D	K
	RK PPKD			2.200.000		Belanja pemeliharaan		1.000.000	
						Perubahan Sal			2.200.000
11	Beban gaji dan tunjangan		25.000.000		11	Belanja gaji dan tunjangan		25.000.000	
	RK PPKD			25.000.000		Perubahan SAL			25.000.000
12	Komputer		15.000.000		12	Belanja modal pengadaan komputer		15.000.000	
	RK PPKD			15.000.000		Perubahan SAL			15.000.000
13	Alat angkutan darat bermotor		40.000.000		13	Blj modal pengadaan alat angk.darat bermotor		40.000.000	
	RP PPKD			40.000.000					40.000.000
14	Piutang pajak daerah		45.000.000		14	No entry			
	Pendapatan PBB P&P-LO			20.000.000					
	Pendapatan BPHTB-LO			10.000.000					
	Pendptn pjg penerangan jalan-LO			15.000.000					
15	Kas di Bendahara Penerimaan		16.000.000		15	Perubahan SAL		16.000.000	
	Pendapatan pajak hotel-LO			8.500.000		Pendapatan pajak hotel-LRA			8.500.000
	Pendapatan pajak restoran-LO			7.500.000		Pendapatan pajak restoran-LRA			7.500.000
16	RK PPKD		16.000.000		16	No entry			
	Kas di Bendahara Penerimaan			16.000.000					
17	Kas di Bendaharan Penerimaan		41.000.000		17	Perubahan SAL		41.000.000	
	Piutang pajak daerah			41.000.000		Pendapatan PBB P&P-LRA			16.000.000
						Pendapatan BPHTB-LRA			10.000.000
						Pendptn pjg penerangan jln-LRA			15.000.000
18	RK PPKD		41.000.000		18	No entry			
	Kas di Bendahara Penerimaan			41.000.000					
19	Kas di Bendahara Penerimaan		7.000.000		19	Perubahan SAL		7.000.000	
	Pdptn diterima dimuka lainnya			7.000.000		Pendapatan pajak reklame-LRA			7.000.000

### Posting ke Buku Besar

Setelah dilakukan jurnal atas setiap transaksi, selanjutnya dilakukan posting ke Buku Besar supaya memudahkan penyusunan Neraca Saldo

Cara posting ke buku besar tidak berbeda dengan posting pada akuntansi di perusahaan

Neraca Saldo		
SKPD A		
31 Desember 20xx		
	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran	700.000	
Piutang Pajak Daerah	4.000.000	
Persediaan Bahan pakai Habis	5.000.000	
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000	
Alat Angkutan Darat Bermotor	82.000.000	
Alat Kantor	6.000.000	
Alat Rumah Tangga	4.000.000	
Komputer	20.000.000	
Meja dan Kursi Kerja	8.000.000	
Ak. Peny. Peralatan dan Mesin		13.000.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000	
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	75.000.000	
Ak. Peny. Gedung dan Bangunan		22.500.000
Utang Belanja Barang dan jasa		400.000
Pendapatan diterima Dimuka lainnya		7.000.000
Ekuitas		362.500.000
perubahan SAL		19.950.000
RK PPKD		27.650.000
Pendapatan Pajak Hotel-LRA		8.500.000
Pendapatan Pajak Restoran-LRA		7.500.000
Pendapatan Pajak Reklame-LRA		7.000.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA		16.000.000
Pendapatan Pajak PBB P&B-LRA		18.000.000
Pendapatan BPHTB-LRA		10.000.000
Belanja Gaji dan tunjangan	25.000.000	
Belanja Jasa Kantor	1.200.000	
Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000	
Belanja Perawatan kendaraan Bermotor	1.200.000	
Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000	
Belanja Pemeliharaan	1.000.000	
Belanja Mdl Peng. Alat Angkutan DB	40.000.000	
Belanja Modal pengadaan Komputer	15.000.000	
Pendapatan Pajak Hotel-LO		8.500.000
Pendapatan Pajak Restoran-LO		7.500.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO		15.000.000
Pendapatan Pajak PBB P&P-LO		20.000.000
Pendapatan BPHTB-LO		10.000.000
Beban Gaji dan Tunjangan	25.000.000	
Beban Jasa Kantor	1.600.000	
Beban Bahan pakai Habis	1.250.000	
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000	
Beban Perjalanan Dinas	2.300.000	
Beban pemeliharaan	1.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>581.000.000</b>	<b>581.000.000</b>



Penyesuaian:

1. Persediaan bahan pakai habis yang tersisa ditangan sebesar Rp.4.500.000
2. Piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp.200.000
3. Penyusutan pada periode ini adalah
  - a. Penyusutan alat angkutan darat bermotor Rp. 200.000
  - b. Penyusutan alat kantor Rp.600.000
  - c. Penyusutan alat rumah tangga Rp.400.000
  - d. Penyusutan computer Rp.2.000.000
  - e. Penyusutan mejad dan kursi kerja Rp.800.000
  - f. Penyusutan bangunan Gedung tempat kerja Rp.7.500.000
  - g. Penyusutan bangunan Gedung tempat tinggal Rp.3.650.000
4. Pajak reklame diterima dimuka yang telah menjadi hak pemerintah daerah aalah Rp.4.000.000

Ayat Jurnal Penyesuaian

<b>Junal Penyesuaian</b>				
<b>SKPD A</b>				
<b>Untuk Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20xx</b>				
Tgl.	Keterangan	P/R	D	K
1	Beban bahan pakai habis		500.000	
	Persediaan bahan pakai habis			500.000
2	Beban penyisihan piutang pendapatan		200.000	
	Penyisihan piutang pendapatan			200.000
3	Beban penyusutan peralatan dan mesin	40.000.000		
	Ak. Penyusutan peralatan dan mesin			40.000.000
	Beban penyusutan gedung & bangunan	12.000.000		
	Ak. Penyusutan gedung & bangunan			12.000.000
4	Pendapatan diterima dimuka lainnya	4.000.000		
	Pendapatan pajak reklame-LO			4.000.000

## Kertas Kerja

Kertas kerja dibuat sama seperti membuat kertas kerja pada perusahaan dengan ketentuan:

1. Lajur laporan keuangan disajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca
2. Laba/Rugi dalam laporan perusahaan diganti dengan Surplus/Defisit LO Diperoleh
3. Defisit LRA sebesar Rp.19.950.000 (diletakkan di debet)
4. Surplus LO Rp.8.700.000 (diletakkan di kredit).

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas
2. Disusun berdasarkan basis kas

<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>		
<b>SKPD A</b>		
<b>Untuk Tahun tang Berakhir 31 Desember 20xx</b>		
<b>PERNDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Hotel-LRA	8.500.000	
Pendapatan Pajak Restoran-LRA	7.500.000	
Pendapatan Pajak Reklame-LRA	7.000.000	
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA	16.000.000	
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan-LRA	18.000.000	
Pendapatan BPHTB-LRA	10.000.000	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		67.000.000
<b>BELANJA</b>		
Belanja Operasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan	25.000.000	
Belanja Jasa Kantor	1.200.000	
Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000	
Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000	
Belanja Pemeliharaan	1.000.000	
Jumlah Belanja Operasi	31.950.000	
Belanja Modal		
Belanja Modal Peng. Alat Angk. Darat Bermotor	40.000.000	
Blanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000	
Jumlah Belanja Modal	55.000.000	
Jumlah Belanja		<u>86.950.000</u>
<b>Surplus/Defisit LRA</b>		<b>(19.950.000)</b>

## Jurnal Penutup pelaksanaan Anggaran

Tahapan:

1. Menutup Pendapatan LRA dan Belanja ke Surplus/Defisit LRA
2. Menutup Surplus/Defisit LRA ke Ekuitas SAL
3. Menutup Perubahan SAL ke Ekuitas

Jurnal Penutup SKPD A Untuk Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20xx				
	Keterangan	P/R	Debet	Kredit
1	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		8.500.000	
	Pendapatan pajak Restoran-LRA		7.500.000	
	Pendapatan Pajak Reklame-LRA		7.000.000	
	Pendapatan pajak Penerangan Jalan-LRA		16.000.000	
	Pendapatan pajak PBB Pedesaan & Perkotaan-LRA		18.000.000	
	Pendapatan BPHTB-LRA		10.000.000	
	Surplus/Defisit LRA		19.950.000	
	Belanja Gaji dan Tunjangan			25.000.000
	Belanja Jasa Kantor			1.200.000
	Belanja Bahan Pakai Habis			1.250.000
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			1.200.000
	Belanja Perjalanan Dinas			2.300.000
	Belanja Pemeliharaan			1.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			40.000.000
	Belanja Modal pengadaan Komputer			15.000.000
2	Ekuitas SAL		19.500.000	
	Surplus/Defisit SAL			19.500.000
3	Pendapatan SAL		19.500.000	
	Ekuitas			19.500.000

### Laporan Operasional

- Laporan yang menunjukkan kinerja yang lebih lengkap
- Disusun Berdasarkan basis akrual

<b>Laporan Operasional</b>		
<b>SKPD A</b>		
<b>Untuk Tahun tang Berakhir 31 Desember 20xx</b>		
<b>PERNDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Hotel-LO	8.500.000	
Pendapatan Pajak Restoran-LO	7.500.000	
Pendapatan Pajak Reklame-LO	4.000.000	
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO	15.000.000	
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO	20.000.000	
Pendapatan BPHTB-LO	10.000.000	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		65.000.000
<b>BELANJA</b>		
Belanja Operasi		
Beban Gaji dan Tunjangan	25.000.000	
Beban Jasa Kantor	1.600.000	
Beban Bahan Pakai Habis	1.750.000	
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000	
Beban Perjalanan Dinas	2.300.000	
Beban Pemeliharaan	1.000.000	
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	12.000.000	
Beban Gedung dan Bangunan	11.250.000	
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	200.000	
Jumlah Beban Operasi		<u>56.300.000</u>
<b>Surplus/Defisit LRA</b>		<b>8.700.000</b>

Untuk menutup akun-akun nominal pada Laporan Operasional

- Tahap 01: Menutup Pendapatan dan Beban LO ke Surplus/Defisit LO
- Tahap 02: Menutup Surplus/Defisit LO ke Ekuitas

<b>Jurnal Penutup SKPD A Untuk Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20xx</b>				
	Keterangan	P/R	Debet	Kredit
1	Pendapatan Pajak Hotel-LO		8.500.000	
	Pendapatan pajak Restoran-LO		7.500.000	
	Pendapatan Pajak Reklame-LO		4.000.000	
	Pendapatan pajak Penerangan Jalan-LO		15.000.000	
	Pendapatan pajak PBB Pedesaan & Perkotaan-LO		20.000.000	
	Pendapatan BPHTB-LO		10.000.000	
	Surplus/Defisit LO			8.700.000
	Beban Gaji dan Tunjangan			25.000.000
	Beban Jasa Kantor			1.600.000
	Beban Bahan Pakai Habis			1.750.000
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor			1.200.000
	Beban Perjalanan Dinas			2.300.000
	Beban Pemeliharaan			200.000
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan			12.000.000
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			11.250.000
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
2	Surplus/Defisit-LO		8.700.000	
	Ekuitas			8.700.000

### Laporan Perubahan Ekuitas

Adalah penghubung antara LRA, LO dan Neraca

<b>Laporan Perubahan Ekuitas SKPD A Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx</b>	
Ekuitas Awal	362.500.000
Ekuitas	28.650.000
Ekuitas SAL	(19.950.000)
RK PPKD	<u>27.650.000</u>
Ekuitas Akhir	<b>398.850.000</b>

## Neraca

<b>Neraca Saldo</b>			
<b>SKPD A</b>			
<b>31 Desember 20xx</b>			
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>400.000</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>700.000</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>398.850.000</b>
<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(200.000)</b>		
<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000</b>		
<b>Tanah untuk Bangunan Gedung</b>	<b>100.000.000</b>		
<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>82.000.000</b>		
<b>Alat Kantor</b>	<b>6.000.000</b>		
<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>Komputer</b>	<b>20.000.000</b>		
<b>Meja dan Kursi Kerja</b>	<b>8.000.000</b>		
<b>Ak. Peny. Peralatan dan Mesin</b>	<b>(25.000.000)</b>		
<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>150.000.000</b>		
<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	<b>75.000.000</b>		
<b>Ak. Peny. Gedung dan Bangunan</b>	<b>(33.750.000)</b>		
<b>Jumlah</b>	<b>402.250.000</b>		<b>402.250.000</b>